

**ANALISIS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DI KELURAHAN MERJOSARI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

**YOHANES HERIAWAN
NIM : 2019210180**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

RINGKASAN

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah Analisis Pembangunan Partisipatif (PDA) telah berhasil digunakan di Kelurahan Merjosari Kota Malang, hingga benar-benar diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Tentu saja masyarakat akan senang dengan hasil pembangunan tersebut. Musrenbang kecamatan mencakup pelibatan masyarakat, dan rencana partisipasi ini akan menghasilkan program-program yang selaras dengan standar yang disajikan dalam rancangan anggaran. Permasalahan yang sedang diselidiki adalah bagaimana masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh meluapnya air. Pendekatan kualitatif digunakan dalam pendekatan ini. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari beberapa sumber data untuk penelitian. Metodologi pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan analisis data kesimpulan digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini Menyimpulkan bahwa Analisis Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Merjosari Kota Malang dapat diimplementasikan dari partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan. Dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan adanya faktor pendukung yakni, pola pemikiran dan tenaga. sedangkan faktor penghambat yaitu, kekurangan informasi, usulan yang tidak terpenuhi dan waktu.

Kata Kunci : Partisipasi Pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen kunci dari proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dapat memperoleh sejumlah manfaat penting. Partisipasi masyarakat sangat penting karena memungkinkan kita memahami kebutuhan dan tujuan masyarakat dengan lebih baik. Melalui pendekatan ini, para pemangku kepentingan mempunyai kesempatan untuk mendengar langsung dari masyarakat, memahami tantangan dan aspirasi mereka terhadap pertumbuhan. Masyarakat mempunyai pengalaman langsung dengan perjuangan sehari-hari dan pemahaman luas mengenai situasi yang terjadi di lapangan. Strategi dan program pembangunan dapat lebih mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat dengan menggabungkannya.

Selain itu, keterlibatan masyarakat akan meningkatkan validitas dan kredibilitas pembangunan. Masyarakat merasa dihargai dan diakui sebagai mitra penting ketika mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya diperkuat oleh hal ini. Membangun kepercayaan melalui keterlibatan masyarakat memperkuat landasan pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan. Melibatkan masyarakat merupakan komponen penting lainnya dalam penyelesaian masalah yang lebih baik.

Melalui keterlibatan mereka, kita dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman komunitas untuk menemukan dan menerapkan solusi yang lebih fokus dan berjangka panjang. Masyarakat sangat menyadari permasalahan yang mereka hadapi, dan ketika kita melibatkan mereka dalam proses tersebut, kita dapat memberikan jawaban yang lebih baik.

Partisipasi dalam masyarakat memperkuat kemampuan baik orang maupun kelompok yang ada di dalamnya. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dapat memperoleh kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mengawasi dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan membentuk landasan yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Selain itu, keterlibatan masyarakat mempengaruhi kepemilikan dan keberlanjutan proyek.

Masyarakat merasakan rasa memiliki dan akuntabilitas atas hasil ketika mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena masyarakat akan lebih aktif dalam menyelenggarakan dan memelihara program dan infrastruktur yang dibangun, hal ini mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan ketika proyek tersebut secara resmi berakhir, masyarakat dapat melanjutkan proyek pembangunan mereka.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan mengapa keterlibatan dalam pembangunan daerah mendapat prioritas utama. Masyarakat harus terlibat aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Komponen kunci untuk mencapai tata kelola yang baik adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Hosnan, 2007). Menurut Budiarjo

dalam Hosnan (2007), kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Program-program pembangunan ekonomi, sosial, politik, fisik, dan bentuk-bentuk pembangunan lainnya diciptakan dan dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat (Tjokromidjojo, 2004).

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan dan menyelaraskan dengan pola pikir yang berorientasi reformasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 21–27; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 150–154 dan 179–199; dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2006 tentang Desa dan Kelurahan semuanya memuat referensi terhadap kebijakan ini.

Sejumlah kebijakan ini menjadikan warga negara sebagai agen sekaligus sasaran pembangunan. Dengan kata lain, proses pembangunan bersifat top-down dan bottom-up (Fadil, 2013).

Proses pembangunan yang bersifat bottom-up memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam prosesnya. Warga lainnya dapat mendiskusikan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan pemerintah daerah dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pembangunan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kesadaran akan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan daerah, antara lain jalan rusak, lampu jalan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan akan berjalan jelas jika masyarakat setempat dilibatkan dalam proses perencanaan. Usulan atau keputusan

rapat yang dihasilkan dari diskusi masyarakat ini dapat ditindaklanjuti setinggi-tingginya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 1 ayat 11 telah memperkuat partisipasi warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Penjelasan mengenai Musrenbang, forum tahunan yang mempertemukan perangkat desa dan warga untuk menyepakati rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, disajikan pada paragraf ini. Warga dapat melakukan diskusi menggunakan musrenbang untuk menyuarakan pendapatnya mengenai ruang lingkup prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan.

Keputusan Musrenbang ini dapat dilanjutkan oleh RPJM kecamatan/desa. Dalam hal perencanaan telah dituangkan dalam RPJM, maka pemangku kepentingan harus menyelesaikan perencanaan tersebut. Permasalahannya adalah para pengambil keputusan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendapat masyarakat ketika mereka berpartisipasi.

Limasan air hujan di badan jalan yang tergenang dan perlahan menggerus permukaan Jalan Tirta Agung, Desa Merjosari, selama ini masih menjadi permasalahan masyarakat. Hal ini disebabkan program yang diusung warga belum dilaksanakan sehingga air hujan tidak dapat terkumpul dan merembes ke rumah-rumah di sekitarnya.

Warga di RT 01/RW 07 selama ini kesulitan dengan minimnya keterlibatan aparat kecamatan sehingga mengakibatkan air menggenang di jalan. Selain itu, posisi sudut yang lancip memungkinkan terjadinya penyumbatan saluran dan

limpasan air hujan. Warga RT 01/RW 07 juga terus memberikan ide pembangunan karena sangat membutuhkan drainase tersebut.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Dimulai dari tahap perencanaan dan berlanjut hingga pemberian usulan program pembangunan dan pemantauan program adalah beberapa di antara keterlibatan ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa atau wilayah melalui program Musrembang diharapkan dapat membawa tindak lanjut dalam RPJM desa atau wilayah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan penting masih belum terjawab mengenai keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan peran mereka di kecamatan.

Untuk meminimalisir kerusakan jalan akibat gerusan air dan menjamin keselamatan pengguna jalan, warga RT 01/RW 07 wajib ikut serta dalam pembangunan drainase. Itu adalah partisipasi masyarakat atas pembangunan didaerahnya hanya sebatas pada pengusulan program melalui lembaga LPM pada Musrenbang. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan menganalisis peran dan partisipasi masyarakat Kelurahan Merjosari dalam partisipasi pembangunan. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pembangunan Partisipatif Masyarakat di Kelurahan Merjosari Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Resapan/Drainase Di Kelurahan Merjosari Kota Malang?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Merjosari Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan di RT 01/RW 07 Kelurahan Merjosari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan teori partisipasi pada masyarakat.
2. Manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya partisipasi pembangunan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anomsari, E. T., & Abubakar, R. R. T. 2019. Program Pembangunan Partisipatif Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *NATAPRAJA*, 7(1), 121-138. Diakses pada tanggal 04 april 2023
- Baum, H. S. (1999). Forgetting to Plan. *Journal of Planning Education and Research*, 19(1), 2–14. Diakses pada tanggal 04 april 2023
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Cheema, Shabbir, G., Dennis A., Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills,CA,: Sage.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dwiningrum, A. S. I. 2009. *Desentralisasi. Dan Partisipasi Dan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Dwiyanto, A. 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui*. Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press
- Fadil, Fathurrahman. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*.
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Handayani, Suci. 2006. *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif (Sebuah Pengalaman di Kota Solo)*. Solo: Kompip.
- Hardianti, S. 2017. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)". *Katalogis*, 5(1).
- Heller, K., Price, R.H., Reinharz, S, dkk. 1984. *Psychology and Community Change: Challenges of the future* (2nd ed.). Homewood, Il: Dorsey.
- Hosnan. 2007. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Membangun Indonesia dari Daerah: Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*. Jakarta: JICA.
- Kaho, J.R. 2002. *Prospek otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Pengarang. Komarudin. Penerbit. Yayasan Realestat Indonesia - PT. Rakasindo.
- Kriyantono, R. 2006. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT emaja Rosdakarya.
- Kurniyati, Yuni. 2019. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Bayang Kabupaten Lampung Utara*". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Mikkelsen, Brithah. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, J Lexy. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (Kualitas Analisis Data)*. Jakarta: UI Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3. Usa: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Ui-Press.
- Morrell, E. & Widianingsih."Participatory Planing In Indonesia". Policy Studies, 28, No. 1 (2007): 1-15.
- Raharjo, Dawam. 2012. *Ekonomi Politik Pembangunan*. LSAF.
- Sastropoetro. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sigalingging, Angelius Henry."Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan". Jurnal Administrasi Publik, 04, No. 2 (2014): 116-145.
- Siregar. I. 2001. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Depok: Universitas Indonesia Press. Soekanto, S. 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, A. L., & Corbin, J. M. 2014. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage publications.
- Sumampouw, Monique. 2004. "*Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*." Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Triwibowo, Darmawan; & Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.

Veithzal, R. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.

Wahyuningsi. 2016. "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*". Skripsi. Makassar: STIA Lan Makassar.